



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.392.211.749.000,57
b. Belanja	<u>Rp. 1.381.081.485.920,21</u>
Defisit	Rp. 11.130.263.080,36
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 54.772.580.891,02
2. Pengeluaran	<u>Rp. 33.362.145.400,00</u>

3. Surplus	Rp.	21.410.435.491,02
d. SiLpa Tahun Anggaran Berkenaan	Rp.	32.540.698.571,38

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp.51.904.465.772,06) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.444.152.214.772,63
 2. Realisasi Rp. 1.392.211.749.000,57
 3. Selisih lebih / (kurang) (Rp. 51.940.465.772,06)
- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp.84.648.352.209,31) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 1.465.729.838.129,52
 2. Realisasi Rp. 1.381.081.485.920,21
 3. Selisih lebih / (kurang) (Rp. 84.648.352.209,31)
- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/ Defisit sejumlah Rp.32.707.886.437,25 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Surplus / defisit setelah Perubahan (Rp. 21.577.623.356,89)
 2. Realisasi (Rp. 11.130.263.080,36)
 3. Selisih lebih / (kurang) (Rp. 32.707.886.437,25)
- d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp.182.187.865,87) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 54.954.768.756,89
 2. Realisasi Rp. 54.772.580.892,02
 3. Selisih lebih / (kurang) (Rp. 182.187.865,87)
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp.15.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 33.377.145.400,00
 2. Realisasi Rp. 33.362.145.400,00
 3. Selisih lebih / (kurang) (Rp. 15.000.000,00)
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp.167.187.865,87) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 21.577.623.356,89
2. Realisasi	<u>Rp. 21.410.435.491,02</u>
3. Selisih lebih / (kurang)	(Rp. 167.187.865,87)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 2.089.566.806.448,00
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 81.803.406.583,58
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 2.089.566.806.448,00

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2016	Rp. 55.119.573.165,89
b. Arus Kas dari aktiva operasi	Rp. 298.188.354.731,36
c. Arus Kas dari aktivitas investasi asset non keuangan	(Rp.287.053.915.651,00)
d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan	(Rp. 33.362.145.400,00)
e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran	(Rp. 715.566.235,41)
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2016	Rp. 32.695.883.904,38

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2016 memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos Laporan Keuangan.

Pasal 7

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran

- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut Urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan Kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
 - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;
 - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah;
 - Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; dan
 - Lampiran I.12 : Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
- b. Lampiran II : Neraca;
 - c. Lampiran III : Laporan arus kas;
 - d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
 - e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri atas:
- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini; dan
 - b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran VI.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

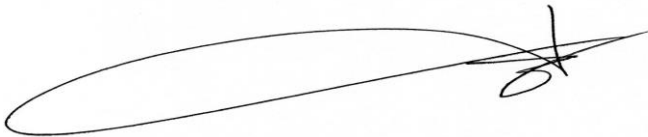
ditetapkan di Palu
pada tanggal 8 Agustus 2017
WALI KOTA PALU,
ttd
HIDAYAT

diundangkan di Palu
pada tanggal 8 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I
LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Trisno Yuniyanto D.P.
NIP. 19740630 200212 1 006

**NOREG 65 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 03 / 2017**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU
TAHUN ANGGARAN 2016

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kemasyarakatan di Daerah akan lebih efektif efisien dan optimal terlaksana bila di ikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan Daerah. Kepala Daerah selaku kepala Pemerintahan di Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah setiap Tahun Anggaran berjalan dan dipertanggungjawabkan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Untuk melaksanakan perintah tersebut, maka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2016 perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 3